BAB III
GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN NOMOR
10/PDT.G/2019/PTA.BJM

A. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

1. Posisi Kasus

Pada putusan pengadilan agama Banjarmasin nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm terdapat sengketa ekomoni syariah yang terjadi antara nasabah sebagai penggugat dan bank syariah sebagai tergugat. Mereka membuat perjanjian pembiayaan *murabahah* dengan dana pinjaman sebesar Rp.23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah) untuk pembuatan tiga buah kapal tug boat dengan pencairan dananya sebanyak 3 kali.

Awalnya pencairan dana yang pertama dan kedua berjalan lancar dan begitupun angsuran yang dibayarkan. Sampai pada pencairan yang ketiga mulai macet. Dikarenakan macetnya pencairan dana tersebut memberikan dampak kerugian kepada usaha dari si penggugat.

Oleh sebab itulah penggugat melakukan gugatan ke pengadilan agama dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Saat dalam persidangan tergugat memberikan alasan untuk tidak dicairkannya dana tersebut yaitu karena penggugat sendiri yang mengatakan apabila belum selesainya tiga tug boat tersebut tidak akan meminta pencairan yang terakhir.

Merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim tingkat pertama penggugat akhirnya melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;
2. Menyatakan eksepsi tergugat bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dapat diterima;
3. Menyatakan eksepsi tergugat bahwa gugatan penggugat kurang pihak ditolak;
4. Menyatakan eksepsi tergugat bahwa penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ditolak;

Dalam pokok perkara

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa penggugat/pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak tergugat/terbanding secara sempurna, dan sesuai dengan surat panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/340/HK.05/2/2019, tanggal 4 Februari 2019, permohonan banding tersebut telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 4 Februari 2019.

Menimbang bahwa penggugat/pembanding telah mengajukan memori banding sesuai surat tanda terima memori banding oleh panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 Desember 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak terbanding dengan sempurna. Sedangkan tergugat/terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sesuai surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 15 Februari 2019.

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa penggugat/pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2018 sedangkan pihak penggugat/pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor. 874/Pdt.G/2018/PA.Bjm yakni tanggal 14 November 2018, dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 12 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula karena permohonan banding penggugat/pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding perkara ini, yakni Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, serta seluruh berita acara sidang perkara tersebut, memori banding pembanding, dan kontra memori banding terbanding, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa, benar surat gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur tidak jelas (*obscur libel*), dengan beberapa alasan; Pertama, dalam posita gugatannya penggugat mendalilkan tentang dasar gugatannya berupa adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat, mestinya penggugat dalam petitumnya meminta agar tergugat dinyatakan wanprestasi karena telah melanggar isi perjanjian,

bukan melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, dalam surat gugatannya penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas perjanjian mana yang merupakan dasar gugatannya. Ketiga, penggugat tidak menjelaskan tentang apa hubungan antara dana pribadi penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000.00 dengan gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang pula oleh majelis hakim, tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). dengan alasan-alasan: bahwa CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal dan ikut serta mengajukan permohonan pembiayaan bersama dengan penggugat sehingga seharusnya penggugat menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini, Bahwa CV Rindu Alam ikut serta dalam proses permohonan pembiayaan yang dibuat oleh penggugat dan ditujukan kepada tergugat dimana CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal yang bekerja sama dengan penggugat dalam hal pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sebagaimana surat penawaran pembuatan 1 (satu) unit tug boat yang dibuat oleh CV Rindu Alam kepada penggugat tertanggal 28 Januari 2015 yang dilampirkan dalam surat pertanggal 08 April 2015 yang diberikan penggugat kepada tergugat, Bahwa pencairan atas permohonan pembiayaan oleh penggugat yang telah disetujui oleh tergugat nantinya akan langsung

diterima oleh CV Rindu Alam sehingga CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara penggugat dengan tergugat ini.

Terhadap eksepsi tergugat tersebut penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut: Bahwa tergugat adalah pihak yang berhubungan langsung dengan penggugat sesuai dengan akad pembiayaan *al murabahah* Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang di buat oleh Muhammad Akhwan, S,H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin, oleh karenanya Penggugat telah tepat (*Redelijk*) dan tidak salah alamat (*Error In Persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat dan Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya. Mengutip dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya”; Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi *plurium litis consortium* atau kurang pihak ini, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa CV Rindu Alam dalam perjanjian *murabahah* antara penggugat dan tergugat adalah disebut sebagai pemasok yaitu pihak ketiga yang ditunjuk atau setidaknya disetujui dan dikuasakan oleh bank untuk menyediakan barang yang dibeli oleh nasabah untuk dan atas nama bank (sebagaimana didefinisikan dalam bukti T.4 akta pembiayaan *al murabahah* Pasal 1 angka 4), bahkan dalam surat gugatan Penggugat halaman 6 pada angka 1.8 Penggugat sendiri mendalilkan bahwa seluruh dana pada fasilitas kredit *murabahah* yang

dicairkan oleh tergugat semuanya baik secara sekaligus maupun bertahap di masukkan ke rekening CV. Rindu Alam dengan Direktur bernama Ir. Daniel Betteng, dan pada angka 1.9 surat gugatan penggugat, penggugat mendalihkan bahwa dana yang di cairkan tergugat ke CV. Rindu Alam diperuntukkan oleh penggugat untuk pembayaran biaya pembelian kapal dan sesuai kesepakatan akan digunakan oleh penggugat untuk usaha yang dijalankan oleh penggugat, maka dengan demikian terbukti bahwa benar pihak CV. Rindu Alam dengan Direktur bernama Ir. Daniel Betteng, terlibat langsung dalam kegiatan perjanjian pembiayaan *murabahah* untuk pengadaan 3 unit kapal tug boat, antara penggugat dengan tergugat, maka oleh karena itu CV. Rindu Alam tersebut harus dimasukkan oleh penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak dimasukkannya pihak CV. Rindu Alam sebagai pihak dalam perkara ini membuat gugatan penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang pula oleh majelis hakim bahwa tergugat dalam jawabannya juga mendalihkan eksepsi bahwa penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*) dengan dalil-dalil sebagai berikut: bahwa perjanjian antara tergugat dengan penggugat merupakan perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, bahwa penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mempunyai tunggakan hutang kepada tergugat sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas

milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017 dimana hal tersebut merupakan kewajiban penggugat sebagai debitur tergugat, bahwa penggugat tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sampai dengan 100% (seratus persen), bahwa penggugat mengajukan gugatan ini karena tergugat menunda pencairan sisa pembayaran sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa di dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan *Al Murabahah* Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 telah jelas diperjanjikan bahwa penggugat sebagai nasabah bersedia serta membebaskan tergugat sebagai bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut. Oleh karena itu seharusnya penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada tergugat melalui upaya hukum apapun atas tindakan tergugat yang melakukan penundaan pencairan pembiayaan kepada penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan *Al murabahah* Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 tersebut.

Terhadap dalil eksepsi tergugat ini, penggugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut: penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum berdasarkan Akad Pembiayaan *Al murabahah* Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin. Gugatan ini diajukan dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu:

1. Tidak memberikan salinan perjanjian Akad Pembiayaan *Al murabahah* Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin.
2. Menahan uang pembiayaan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
3. Tidak memberikan rekening informasi nomor rekening escrow serta rekening korannya.
4. Tergugat melaporkan penggugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/64/V/2017/KALSEL/SPKT tertanggal 16 Mei 2017 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang bahwa penggugat tidak menyangkal dalil eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa penggugat telah lalai melakukan pembayaran angsuran hutang penggugat kepada tergugat, sehingga terjadi tunggakan hutang penggugat kepada tergugat sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017, begitu pula dalil eksepsi bahwa penggugat tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sampai dengan 100% (seratus persen), maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa benar penggugat tidak memenuhi isi perjanjian antara penggugat dengan tergugat, dalam hal ini pembiayaan pengadaan 3 unit tug boat, dalam suatu akad *murabahah* .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding, berpendapat, bahwa adalah suatu ketidakadilan apabila salah

satu pihak yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana disepakati dalam suatu perjanjian, diizinkan pula untuk menggugat pihak lawannya dengan alasan tidak melakukan kewajibannya, dalam masalah ini majelis hakim tingkat banding sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” hal. 461, “ bahwa seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian”, maka oleh karena itu, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (sesuai azas *exceptio non adimpleti contractus*) maka oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis hakim menimbang dalam konvensi bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dalam eksepsi tersebut di atas dimana seluruh dalil eksepsi dinyatakan terbukti dan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima

Majelis hakim menimbang dalam rekonvensi bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam pokok perkara dalam bagian konvensi di atas sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka rekonvensi penggugat rekonvensi/tergugat konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis hakim menimbang dalam konvensi dan rekonvensi bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi/pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian penggugat konvensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg penggugat konvensi/pembanding

dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

3. Amar Putusan

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 - Dalam Pokok Perkara
Dalam Konvensi :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Dalam Rekonvensi :
 - Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
 - Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
 - Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

B. Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm penggugat telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang telah memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Setelah mengetahui duduk perkara kasus ekonomi syariah dalam putusan nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm hal menarik untuk ditelaah adalah gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*exemptio obscur libel*) dan gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang mana kedua tersebut terdapat pada pertimbangan majelis hakim tingkat banding.

1. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*exemptio obscur libel*)

Ketika menelusuri pertimbangan pertama majelis hakim dalam putusan nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, gugatan dari penggugat dinyatakan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas dengan alasan pertama bahwa dalam posita poin 1.1 sampai dengan 1.3 pokok gugatan, penggugat mendalilkan bahwa yang mendasari perkara ini adalah adanya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara berupa perjanjian antara penggugat dengan tergugat, dimana seluruh posita penggugat menggunakan dasar perikatan, tetapi di dalam petitum penggugat menuntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, mestinya penggugat dalam petitumnya

meminta agar tergugat dinyatakan wanprestasi karena telah melanggar isi perjanjian, bukan melakukan perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana yang diketahui bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertera dalam perikatan maupun perjanjian, bisa disebabkan kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian atau sebab keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).⁹⁷ Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁹⁸ Perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diawali adanya perbedaan hubungan hukum berdasarkan perjanjian dan hubungan hukum berdasarkan undang-undang⁹⁹

Berdasarkan dari yang peneliti baca dari putusan nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Bjm dalam pokok gugatan poin 3 disitu tertera penggugat menyebutkan dalil dari pada perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1365 KUHPerduta: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Termuat dalam gugatan penggugat ini pun telah disebutkan terdapat kerugian yang berupa materil dan imateril yaitu:

⁹⁷Djaja s. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Hlm.177.

⁹⁸Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*. Hlm. 34.

⁹⁹Isman, “Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 4, No. 1, Tanah Grogot: STIPER Muhammadiyah, April 2021Hlm. 61

- **Kerugian Materiil**, total yang harus dibayar/dilunasi adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan jumlah biaya yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT;
- **Kerugian Imateriil**, Bahwa PENGGUGAT dapat menggunakan dana yang belum di penuhi kewajibannya oleh TERGUGAT untuk usaha PENGGUGAT dan untuk berbagai kegiatan permodalan lainnya yang bila di taksir PENGGUGAT akan bisa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus milyar rupiah) yang sebenarnya adalah Kerugian Imateriil, tercemarnya nama baik Penggugat dan Kerugian Lainnya yang tak terhingga;

Berdasarkan dari teori yang peneliti jelaskan sebelumnya, perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu.¹⁰⁰ Ketika perikatan yang terlahir dari perjanjian apabila tidak terpenuhi maka lahirlah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.

Menurut peneliti kasus ini merupakan salah satu dari bentuk wanprestasi, yaitu wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Berdasarkan bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. dan wanprestasi berupa keliru atau tidak sempurna memenuhi prestasi.¹⁰¹ Meskipun penggugat mendalilkan gugatan menggunakan pasal 1365 KUHPerdara dan mencantumkan kerugian baik dari materiil maupun imateriil,

¹⁰⁰Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*. Hlm. 3.

¹⁰¹Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). Hlm. 103.

tetapi kasus yang terjadi ini berasal dari perjanjian yang mereka buat yaitu perjanjian pembiayaan *murabahah*, maka menurut peneliti sudah sepatutnya pelanggaran ini masuk dalam perkara wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Kemudian untuk alasan kedua dari pertimbangan majelis hakim tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*), yaitu: dalam surat gugatannya penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas perjanjian mana yang merupakan dasar gugatannya.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara satu orang/badan hukum dengan orang yang lain/badan hukum lainnya dalam bidang harta kekayaan, dimana satu orang/badan hukum berhak atas prestasi dan begitu juga satu orang yang lain/badan hukum berkewajiban untuk menjalankan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁰²

Menurut peneliti apabila majelis hakim tingkat banding lebih teliti dalam memeriksa putusan tingkat pertama yaitu putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm, di dalam putusan tersebut ada disebutkan perjanjian yang dimaksud oleh penggugat pada posita poin 1.6 pada halaman 5 dan poin 1.8 pada halaman 6. Meskipun penggugat tidak menyebutkan secara eksplisit tentang apa perjanjian yang diperjanjikan dan para pihak yang terlibat, tetapi dapat dipahami bahwasanya penggugat secara implisit menyebutkan tentang

¹⁰²Aan Handriani, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Banten: Universitas Pamulang, Desember 2018. Hlm. 277.

apa perjanjian yang diperjanjikan dan para pihak yang terlibat, bisa dilihat dari posita si penggugat.

Perjanjian yang disebutkan diatas sudah memenuhi unsur dari perjanjian yaitu unsur essentialia ialah bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan tercipta atau terwujud.¹⁰³ Unsur essentialia nya ialah fasilitas kredit *murabahah* sebesar Rp 23.000.000.000.- untuk pembuatan 3 buah tug boat.

Mengambil sedikit kesimpulan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab *Al- Thuruq al- Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, hakim haruslah memiliki keilmuan yang mendalam agar putusan yang dijatuhkan tidak merugikan bagi para pihak berperkara.

والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في لأمارات ودلائل، ومعرفة شواهد، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهاء في كليات الأحكام: أضع حقوق كثيرة على أصحابها. وحكم بما يعلم الناس بطلانه، لا يشكون فيه، اعتماداً منه على نوع ظاهر، لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله.¹⁰⁴

Diterjemahkan secara rinci oleh Adnan Qohar dan Anshoruddin, hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai dalam membaca situasi dan kondisi sebagai implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud kepada perbuatan maupun perkataan, sebagaimana

¹⁰³Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Hlm. 69.

¹⁰⁴Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al- Thuruq al- Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Hlm. 6.

kemampuan keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan putusan hukum yang dijatuhkan akan merugikan pihak-pihak yang semestinya memperoleh haknya.¹⁰⁵

Menurut peneliti disini hakim sudah tepat mengatakan bahwa gugatan dari penggugat dinyatakan sebagai gugatan kabur bersarkan teori yang terdahulu bahwa ketidakjelasan dalam dasar hukum pada gugatan si penggugat, yang memakai dasar hukum wanprestasi tetapi kasusnya malah perbuatan melawan hukum, yang mana gugatan dari penggugat adanya unsur *obscuur liber* yaitu dasar hukum penggggat tidak jelas. Hal ini selaras dengan teori eksepsi *obscuur libel*, yang mana eksepsi *obscuur libel* adalah eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur). Dalam 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

- a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- c. Objek sengketa tidak jelas; Kerugian tidak dirinci;
- d. Petitum gugatan tidak jelas;
- e. Posita dan petitum saling bertentangan.

¹⁰⁵Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al- Thuruq al- Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin. Hlm. 2. lihat skripsi Soraya Farahdina, *Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)*.

2. Gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Selanjutnya peneliti akan membahas terkait gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Dari pihak tergugat meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan dari penggugat termasuk ke dalam gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena menurut tergugat penggugat tidak mengikut sertakan pihak ketiga dalam gugatannya padahal pihak ketiga itu selaku kontraktor dan ikut serta juga dalam permohonan perjanjian pembiayaan tersebut.

Penggugat lalu memberikan jawabannya bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya, dengan menggunakan dalil yurisprudensi putusan mahkamah agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg. No. 305.K/SIP/1971 yang berbunyi: Azaz Hukum Acara Perdata bahwa hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Selanjutnya majelis hakim tingkat banding tetap mengatakan dalam putusan nomor 10/Pdt.G/1019/PTA.Bjm bahwa gugatan dari penggugat masuk ke dalam gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan pertimbangan dari majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi *plurium litis consortium* atau kurang pihak ini, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa CV Rindu Alam dalam perjanjian *murabahah* antara Penggugat dan Tergugat adalah disebut sebagai Pemasok yaitu pihak ketiga yang ditunjuk atau setidaknya disetujui dan dikuasakan oleh Bank untuk menyediakan barang yang dibeli oleh nasabah untuk dan atas nama Bank (sebagaimana didefinisikan dalam Bukti T.4 Akta Pembiayaan *al murabahah* Pasal 1 angka 4), bahkan dalam surat gugatan Penggugat halaman 6 pada angka

1.8 Penggugat sendiri mendalilkan bahwa seluruh dana pada Fasilitas Kredit *Murabahah* yang dicairkan oleh Tergugat semuanya baik secara sekaligus maupun bertahap di masukkan ke rekening CV. Rindu Alam dengan Direktur bernama Ir. Daniel Betteng, dan pada angka 1.9 surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dana yang di cairkan Tergugat ke CV. Rindu Alam diperuntukkan oleh Penggugat untuk pembayaran biaya pembelian kapal dan sesuai kesepakatan akan digunakan oleh Penggugat untuk usaha yang dijalankan oleh Penggugat, maka dengan demikian terbukti bahwa benar pihak CV. Rindu Alam dengan Direktur bernama Ir. Daniel Betteng, terlibat langsung dalam kegiatan perjanjian pembiayaan *murabahah* untuk pengadaan 3 unit kapal tug boat, antara Penggugat dengan Tergugat, maka oleh karena itu CV. Rindu Alam tersebut harus dimasukkan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak dimasukkannya pihak CV. Rindu Alam sebagai pihak dalam perkara ini membuat gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneiti setuju dengan majelis hakim yang mengatakan gugatan dari si penggugat ini adalah gugatan kurang pihak (*Plirium litis consortium*). Berdasarkan terori yang telah disebutkan, tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai penggugat. Pada kasus ini penggugat tidak melibatkan kontraktor sebagai pihak dalam perkara ini, takutnya dengan tidak kehadirannya kontraktor disini akan mengakibatkan kurangnya informasi yang diperlukan sebagai pertimbangan hakim.

Tetapi ada satu hal yang ingin dibahas oleh peneliti bahwasanya majelis hakim tidak menyebutkan dasar hukum dari pertimbangan beliau. Padahal menurut Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁰⁶

Menurut peneliti sudah seharusnya majelis hakim menyertakan dasar hukum dalam segala pertimbangannya dalam suatu putusan agar tercapainya suatu asas kepastian hukum. Sesuai dengan artikel di website Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A yang ditulis oleh Dewi Atiqah NIP: 199101072017122001 dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.¹⁰⁷

Seharusnya majelis hakim memakai Pasal 1340 KUHPerdara dalam pertimbangan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Berikut bunyi Pasal 1340 KUHPerdara:

¹⁰⁶<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>. Asas-asas putusan hakim yang ditulis oleh Mahmud Hadi rianto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan (Hakim Pengadilan Agama Bajawa-NTT). Diakses pada rabu 5 oktober 2022.

¹⁰⁷<http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatanputusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluar%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal>. Diakses pada rabu 5 oktober 2022.

Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.¹⁰⁸

Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka. Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak, semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat.¹⁰⁹

¹⁰⁸Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985). Hlm. 307.

¹⁰⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pihak-ketiga-mengajukan-gugatan-wanprestasi-lt5128e4fbb65d1>. Diakses pada rabu 5 oktober 2022.